

# JEPANG DAN KETAHANAN EKONOMI REGIONAL ASIA PASCAPAKRISIS

Siti Daulah Khoiriati\*)

*Krisis ekonomi yang melanda Asia sejak 1997, telah meruntuhkan ketahanan ekonomi negara-negara yang oleh Bank Dunia pernah disebut sebagai Keajaiban Asia (The Asian Miracle). Bermula dari jatuhnya nilai mata uang Baht terhadap Dollar di Thailand, krisis kemudian menjalar ke Korea Selatan, Malaysia dan Indonesia, karena contagion effect (efek penularan) yang tidak dapat dibendung. Reaksi pertama dari negara-negara yang terlanda krisis adalah mengharapkan peran aktif Jepang, yang selama ini ekonominya paling kuat.*

*Namun demikian, respon Jepang ternyata relatif terlambat, sehingga muncul kritik-kritik bahwa Jepang "missed the boat," atau Jepang "helpless," yang semuanya ini menunjukkan ketidakmampuan Jepang merespon krisis secara proporsional. Mengapa Jepang tidak berdaya membantu mengatasi krisis?*

Meskipun pada awalnya Jepang dikritik sebagai "helpless", namun pada akhirnya Jepang berhasil menunjukkan komitmennya dengan memberikan bantuan keuangan dalam jumlah yang cukup besar guna membantu mengatasi krisis ekonomi Asia. Melalui *Miyazawa Initiative*, Jepang menyalurkan sejumlah kurang lebih

\$80 milyar ke negara-negara yang mengalami krisis, melalui saluran bilateral maupun multilateral (melalui IMF). Bantuan ini, meskipun terkait dengan kepentingan Jepang untuk menyelamatkan aset-aset ekonominya di kawasan Asia dan menjadi salah satu tumpuan bagi upaya perbaikan ekonomi dalam negerinya, namun telah menyelamatkan negara-negara Asia dari kejatuhan yang lebih parah akibat krisis.

---

\*) Dra. Siti Daulah Khoiriati, M.A., dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tulisan ini bermaksud menelaah masalah bantuan keuangan Jepang dalam mengatasi krisis ekonomi Asia, dengan memfokuskan pada strategi ekonomi-politik Jepang di Asia, dan upaya-upayanya membangun ketahanan ekonomi regional di kawasan Asia. Pada dasarnya, krisis ekonomi Asia tidak terlepas dari pengaruh atau keterlibatan Jepang, sehingga penyelesaiannya pun diperlukan peran dan bantuan Jepang secara aktif.

### **Krisis Ekonomi Asia dan Ketidakberdayaan Jepang**

Apakah krisis ekonomi Asia disebabkan oleh Jepang? Pertanyaan ini banyak dilontarkan oleh para analis sebagai reaksi pertama terhadap terjadinya krisis ekonomi Asia. Memang terdapat perbedaan pendapat di antara para analis mengenai hal ini, namun pada dasarnya mereka mengakui bahwa Jepang punya kaitan erat dengan krisis ekonomi Asia. Inoue Reiko menyatakan bahwa Jepang adalah salah satu faktor utama penyebab krisis keuangan Asia<sup>1</sup>. Argumen yang dikemukakannya adalah, bahwa pertumbuhan ekonomi pesat

yang dialami oleh negara-negara Asia selama beberapa dekade terakhir ini adalah berkat dukungan teknologi, modal dan pasar dari Jepang. Ketika Jepang mengalami "bubble economy" di awal tahun 1980-an, negara-negara Asia tersebut mendapatkan momentum untuk mengejar pertumbuhan dengan dukungan investasi, perdagangan dan turisme dari Jepang. Maka, tumbuhlah negara-negara industri baru secara mengesankan di kawasan ini, yang karena ketahanan ekonominya seringkali dijuluki sebagai macan-macan Asia (*the Asian tigers*).

Akan tetapi, ketika Jepang mengalami depresi ekonomi, yang telah menyebabkan kegiatan ekonomi dalam negerinya menurun, banyak institusi keuangan di negeri ini mulai mengalirkan dana-dana mereka keluar negeri, terutama ke negara-negara Asia. Gejala ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Jepang, namun juga di negara-negara maju lainnya seperti Eropa dan Amerika Serikat. Maka, pada periode antara 1993-1996 manajer-manajer keuangan di Eropa, AS dan Jepang mengalirkan kredit-kredit jangka pendek mereka yang berbunga rendah ke

Thailand, Indonesia dan Malaysia, yang mengakibatkan ekonomi negara-negara tersebut menjadi kepanasan (*overheated economy*).

Dalam kasus di Thailand, kredit-kredit jangka pendek ini disalurkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang bergerak dibidang *real estate* dan spekulasi tanah. Bahkan dalam beberapa kasus ada perusahaan Jepang yang terlibat langsung dalam spekulasi *real estate* ini. Ketika akhirnya investasi di bidang *real estate* di Thailand ini *collapse*, mereka tidak bisa mengembalikan pinjaman jangka pendek tersebut kepada bank-bank di Jepang. Akibatnya, bank-bank di Jepang terbebani oleh kredit macet yang jumlahnya cukup besar, yang pada gilirannya juga memicu krisis finansial di negara ini. Jadi dalam kasus Thailand ini, memang masuk akal kalau kemudian Jepang disalahkan sebagai penyebab terjadinya krisis keuangan, yang kemudian menjalar ke negara-negara Asia lainnya seperti Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan.

Namun demikian, jika dilihat kasus per kasus, sebenarnya penyebab krisis ekonomi Asia berbeda dari satu negara dengan

negara lainnya, dan tidak semata-mata disebabkan oleh Jepang. Hal ini diyakini oleh Kinoshita Toshihiko, yang menyatakan bahwa Jepang bukanlah penyebab terjadinya krisis ekonomi di Thailand maupun di negara-negara Asia lainnya.<sup>2</sup> Menurutnya, penyebab krisis di Thailand ada dua, yaitu pertama, diikatkannya (*pegged*) Baht kepada dollar AS sebagai upaya untuk menarik investasi langsung dari Jepang dan negara-negara maju lainnya; dan kedua, karena terlalu besarnya jumlah investasi jangka pendek yang diperoleh dari luar negeri. Sedangkan dalam kasus Indonesia penyebabnya adalah "kontaminasi" dari nilai Baht yang terdevaluasi, di samping kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan program pembangunan yang dibimbing IMF.

Sementara itu dalam kasus Korea, penyebabnya adalah investasi yang berlebihan dalam pembangunan pabrik-pabrik berskala besar dan pembelian peralatan, serta investasi pada sejumlah *chaebol*.<sup>3</sup> Jadi, tidak benar kalau dikatakan bahwa krisis ekonomi yang terjadi di negara-negara Asia tersebut disebabkan oleh ekonomi Jepang yang meng-

alami stagnasi. Meskipun demikian, memang tidak dapat dipungkiri bahwa melemahnya nilai tukar Yen terhadap dollar telah mengurangi impor Jepang dari negara-negara Asia, yang pada gilirannya memberikan dampak negatif terhadap ekonomi Asia, demikian keterangan Kunihiko. Krisis ekonomi Asia terjadi akibat "*contagion effect*", karena negara-negara Asia telah terikat dalam mata rantai interdependensi ekonomi, yang menjadikan mereka rentan terhadap krisis yang terjadi di salah satu bagian dari rangkaian mata rantai tersebut.

Penolakan yang lebih keras tentang keterlibatan Jepang sebagai penyebab krisis ekonomi Asia dikemukakan oleh Ishihara Sintaro,<sup>4</sup> yang menyatakan bahwa krisis ekonomi Asia terjadi karena kesalahan strategi AS (melalui IMF) yang selalu berusaha untuk menguasai dunia, dan mendiktekan kebijakannya kepada negara-negara sekutunya. "*Japan and the other nations of East Asia will be nothing more than financial slaves to the US,*" demikian pendapat Ishihara. Lebih jauh Ishihara menyatakan bahwa modal berjangka pendek (*short-term capital*) yang diinjek-

sikan oleh AS dan negara-negara Barat lainnya ke Asia Timur adalah ibarat candu yang merusak ketahanan ekonomi kawasan ini. Tujuannya tidak lain adalah, untuk mengganggu jaringan ekonomi yang telah dibangun oleh Jepang dengan negara-negara di kawasan ini. Dalam kata-kata Ishihara:

*"Japanese firms which had teamed up with local enterprises were forced to withdraw and take stock. This provided an opening for American capital to move into the markets that Japan pioneered. Men like (George) Soros merely make way for the arrival of other elements in America's overall strategy."*

Jadi, pada dasarnya memang terdapat berbagai macam interpretasi seputar penyebab terjadinya krisis ekonomi Asia, di mana Jepang selalu menjadi sorotan. Namun yang lebih penting lagi untuk diketahui sebenarnya adalah, bagaimana respon Jepang terhadap krisis tersebut? Mengapa Jepang dikatakan tidak berdaya (*helpless*) dalam krisis tersebut? Ippei Yamazawa menyatakan bahwa pada dasarnya, Jepang melihat krisis ekonomi Asia sebagai "kebakaran di seberang sungai." Bukan sebagai penyebab, dan tidak pula terkena akibatnya, Jepang lebih tepat dikatakan berada dalam posisi di

tengah-tengah krisis ekonomi Asia, dimana dia sendiri tidak berdaya karena stagnasi ekonomi yang berkepanjangan di dalam negerinya.<sup>5</sup>

Sumber utama dari kesulitan ekonomi ini adalah kegagalan institusi-institusi keuangan di Jepang mengelola kredit-kredit macet, sementara masyarakat dibebani oleh kenaikan pajak dari 3% menjadi 5%, serta meningkatnya biaya pemeliharaan kesehatan. Kesemuanya ini menyebabkan menurunnya pengeluaran masyarakat untuk konsumsi, sehingga penjualan menjadi lesu. Di samping itu, melemahnya nilai tukar Yen menjadikan kemampuan Jepang untuk mengimpor barang-barang dari Asia menurun, dan aliran investasi langsung kekawasan ini juga berkurang secara drastis. Sebaliknya, ekspor Jepang cenderung meningkat, karena perusahaan-perusahaan cenderung mengekspor barang-barang dari pabrik mereka di Jepang, daripada dari "subsidiary" mereka di Asia. Hal ini mengakibatkan penerimaan ekspor negara-negara Asia — yang selama ini menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi mereka — menurun secara drastis (dalam penerimaan Dol-

lar AS).

Secara demikian, seperti diungkapkan oleh Hidehiro Shinohara, direktur suatu lembaga riset milik pemerintah, *Research Institute for International Investment and Development*: "the weakness of Japan's economic recovery is throwing a shadow over the Asian economic outlook."<sup>6</sup> Oleh karena itu, tidak salah jika dikatakan bahwa kunci dari perbaikan ekonomi negara-negara Asia yang terlanda krisis adalah dengan perbaikan ekonomi Jepang. Seperti dikemukakan oleh Hiroshi Kuniyoshi:<sup>7</sup>

*"A Japanese economic recovery has become not just a matter of concern for Japan but an issue that could affect the future course of the economy of Asia as well as that of the world. A robust, domestic demand-led recovery in Japan would boost imports from Asian neighbors, thereby contributed to export-led growth in the region.*

Dorongan lebih keras agar Jepang bersungguh-sungguh melaksanakan kebijakan perbaikan ekonominya sebagai prasyarat mengatasi krisis ekonomi Asia datang dari AS dan negara-negara Barat lainnya. Adalah Charlene Barshefsky, pejabat senior perwakilan perdagangan AS (USTR) yang menyatakan bahwa respon Jepang terhadap krisis ekonomi Asia "absolutely in-

*adequate*.”<sup>8</sup> Menurutnya, peran Jepang dalam mengatasi krisis ekonomi Asia sangat vital, karena ekonominya adalah yang terkuat di Asia, dan selama ini menjadi sumber terbesar investasi, pinjaman (*loans*) dan bantuan (*aid*) bagi Asia, di samping sebagai partner dagang utama. Jika kondisi ekonomi Jepang tidak segera membaik, AS dan negara-negara Eropa lainnya khawatir pasar mereka akan dibanjiri oleh produk-produk murah dari Asia Timur yang tidak tertampung oleh Jepang. Kalau hal ini dibiarkan terus-menerus, maka pada akhirnya industri manufaktur mereka akan terpaksa melakukan pengurangan produksi, yang akan berakibat pada pengurangan tenaga kerja.

Walaupun tekanan dari berbagai pihak terhadap Jepang agar membuka pasarnya guna menyerap ekspor negara-negara Asia begitu besar, namun kemampuan Jepang untuk itu ternyata memang terbatas. Karena Jepang sendiri sedang dalam kesulitan ekonomi, maka upaya yang dapat dilakukan Jepang adalah dengan memberikan bantuan keuangan secara langsung. Bantuan ini tentu saja diberikan

dengan motivasi dan tujuan tertentu selain membantu negara-negara Asia keluar dari krisis. Eksplanasi berikut ini akan menjabarkan apa saja motivasi yang mendorong Jepang mengulurkan bantuan keuangan, dan apa keuntungan-keuntungan yang diharapkan Jepang dari bantuan yang diberikannya.

### Dilemma Kepemimpinan Asia

Salah satu motivasi Jepang memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara Asia yang mengalami krisis adalah, untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai negara *super power* ekonomi di Asia. Hal ini memang logis, mengingat Jepang telah lama dipandang sebagai motor pertumbuhan negara-negara Asia, bahkan seringkali dijuluki sebagai “lokomotif pertumbuhan” Asia. Keberhasilan Jepang mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan ini, secara tidak langsung telah menempatkan Jepang dalam posisi sebagai “*leader*” di Asia. Akan tetapi, peran sebagai *leader* ini sebenarnya tidak pernah secara sungguh-sungguh dimainkan oleh Jepang, terutama yang men-

yangkut "*political leadership*" atau kepemimpinan di tingkat kebijakan. Terhambat oleh kebijakan luar negerinya yang selalu mengikuti "*master-plan*" kebijakan luar negeri AS di Asia, Jepang relatif tidak memiliki kemandirian dalam hubungannya dengan Asia. Disamping itu, kekhawatiran negara-negara Asia akan bangkitnya kembali militerisme Jepang jika ia berkesempatan untuk tampil (secara mandiri) sebagai pemimpin kawasan, masih selalu menjadi pertimbangan Jepang dalam setiap kebijakannya terhadap Asia. Oleh karena itu, peran sebagai *leader* di Asia merupakan suatu dilemma bagi Jepang.

Pecahnya krisis ekonomi Asia, sebenarnya merupakan kesempatan tak terduga yang memberikan peluang bagi Jepang untuk memerankan diri sebagai *leader* di Asia. Kuatnya dorongan dari negara-negara Asia (khususnya yang tergabung dalam ASEAN) agar Jepang melakukan sesuatu untuk membantu mereka, menunjukkan adanya kepercayaan dari negara-negara tersebut akan pentingnya keterlibatan Jepang dalam mengatasi krisis. Dalam pertemuan antar-Menteri Keuangan negara-negara Asia di

Tokyo guna membahas situasi di Thailand pada bulan Agustus 1997, beberapa negara Asia mengemukakan rencana tentang pembentukan suatu institusi internasional yang permanen guna memberikan dukungan finansial kepada negara yang terkena krisis. Rencana ini memang telah disiapkan sebelumnya, seperti dikemukakan oleh wakil PM dan Menteri Keuangan Malaysia (pada waktu itu) Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mewakili suara ASEAN dalam suatu interview, bahwa ia akan mendiskusikan "*some other measures that we are planning together.*"<sup>9</sup> Dengan rencana tersebut, lebih lanjut Anwar Ibrahim menyatakan, diharapkan Jepang akan "*more forthcoming and effective in their program, both nationally in terms of their reform package and also to take a greater lead and responsibility in the region.*"<sup>10</sup>

Usulan dari negara-negara Asia ini ternyata ditanggapi dengan baik oleh Jepang. Dalam suatu pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF di Hong Kong setelah pertemuan lanjutan Menteri Keuangan ASEAN di Bangkok pada bulan September 1997, Jepang mengemukakan rencana pembentukan *Asian Monetary*

*Fund* (AMF). Tujuannya adalah untuk membantu memonitor pelaksanaan program IMF di Asia, dan untuk memberikan dukungan finansial (yang mungkin tidak cukup jika hanya diberikan oleh IMF) kepada negara-negara yang terlanda krisis.<sup>11</sup> Proposal ini disambut dengan antusias oleh negara-negara Asia, terutama karena adanya pernyataan wakil Menteri Keuangan Jepang yang berpengaruh, Eisuke Sakakibara, bahwa dana yang akan disalurkan melalui AMF menggunakan mekanisme "*quick-disbursement*". Mekanisme ini dinyatakan lebih fleksibel daripada mekanisme yang selama ini digunakan oleh IMF, karena kebijakan yang disyaratkan untuk dilaksanakan oleh negara penerima bantuan tidak selalu seragam (antara negara satu dengan yang lain), dan secara demikian tidak akan terlalu mengikat.<sup>12</sup>

Usulan tentang AMF ini, serta merta mendapat tentangan keras dari AS dan Bank Dunia, maupun IMF. Stanley Fischer, Wakil Presiden senior IMF menyatakan bahwa keberadaan AMF dapat mengesampingkan otoritas dan efektifitas IMF, sementara Robert Rubin, Menteri Keuangan AS mengkhawatirkan

akan terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan fungsi-fungsi IMF dan AMF, disamping kekhawatiran akan meningkatnya perilaku "*moral hazard*."<sup>13</sup> Meskipun pemerintah Jepang menegaskan bahwa pembentukan AMF tidak akan melanggar batas wilayah otoritas IMF, ataupun mengaburkan fungsi-fungsi yang selama ini diemban IMF maupun menambah persoalan "*moral hazard*", namun baik IMF maupun AS tetap tidak mendukung rencana tersebut. Akibatnya, konsep ini tidak jadi direalisasikan meskipun ide dasarnya tetap dipertahankan, yang kemudian dirumuskan kembali dalam *Manila Framework*.

Penolakan IMF dan AS terhadap ide pembentukan AMF, sedikitnya mengandung dua alasan. Pertama, IMF dan AS tidak menghendaki Jepang mengambil inisiatif secara mandiri dalam membantu mengatasi krisis ekonomi Asia, terlepas dari kerangka yang sudah ditetapkan oleh keduanya. Bahkan upaya Jepang melalui ADB (*Asian Development Bank*)—dimana Jepang mempunyai pengaruh cukup besar—untuk menerapkan kebijakan yang sedikit menyimpang



dari garis kebijakan penyesuaian (*adjustment*) ortodoks yang selama ini dianut Bank Dunia di Washington, juga dipatahkan oleh AS.<sup>14</sup>

Ini berarti upaya Jepang untuk berperan lebih besar dalam mengatasi krisis ekonomi Asia pada *policy level* (pembuatan kebijakan) belum diakui oleh dunia internasional (khususnya AS dan IMF), sehingga perwujudan peran Jepang sebagai *leader* di Asia masih jauh dari harapan. Seperti misalnya kegagalan Jepang mengusulkan kebijakan liberalisasi bertahap bagi negara-negara Asia, adalah salah satu contoh dari keterbatasan Jepang untuk berperan pada *policy levels*. Kinoshita Toshihiko dalam komentarnya mengenai hal ini mengatakan sebagai berikut:

*"Japan has steadfastly contended that developing countries should liberalize their capital transactions, but gradually, according to the country's economic maturity. The US government, on the other hand, has strongly insisted that the NIEs countries, Thailand, Indonesia, and other nations immediately deregulate their capital market, and has essentially forced them to do so. Until yesterday, they were America's good boys."*<sup>15</sup>

Namun demikian, kegagalan Jepang untuk berperan pada *policy level* dalam membantu mengatasi krisis ekonomi Asia, sebe-

narnya tidak semata-mata disebabkan oleh hambatan dari AS maupun IMF. Koichi Hamada berpendapat bahwa, kegagalan Jepang mengusulkan pembentukan AMF disebabkan pula oleh kelemahannya dalam mengkomunikasikan apa yang disebutnya sebagai "*financial diplomacy*" kepada masyarakat internasional. Pada waktu mengusulkan pembentukan AMF dalam pertemuan Menteri Keuangan Asia di Bangkok dan Hong Kong, ide tersebut dikemukakan begitu saja oleh Menteri Keuangan Kiichi Miyazawa tanpa suatu proposal yang komprehensif.<sup>16</sup> Secara demikian, masyarakat internasional akan sulit mengetahui apa sebenarnya yang akan dikerjakan oleh AMF, mengapa negara-negara Asia memerlukan AMF di samping lembaga keuangan internasional lain yang sudah ada, dan mengapa AMF diperlukan untuk menyelesaikan krisis ekonomi, dan sebagainya. Disinilah kelemahan proposal Jepang tentang AMF, yang tidak memiliki landasan falsafah yang jelas untuk melengkapi suatu rencana kebijakan ekonomi yang cukup bagus.<sup>17</sup>

Kedua, pada akhirnya Jepang harus puas dengan hanya berpe-

ran sebagai "financial provider" (dalam bentuk pemberian bantuan keuangan secara langsung) dalam membantu mengatasi krisis ekonomi Asia, tanpa terlibat secara berarti dalam menentukan *policy*.

### Bantuan untuk Menyelamatkan Kepentingan Ekonomi

Gagal dengan proposal tentang AMF, Jepang kemudian mengalihkan perhatiannya untuk membantu mengatasi krisis ekonomi Asia dengan memberikan bantuan keuangan secara langsung (*in cash*). Motivasi utama yang mendorong kebijakan ini adalah, untuk menyelamatkan kepentingan ekonomi Jepang di Asia, terutama yang menyangkut aktivitas-aktivitas perdagangan dan investasinya. Hal ini mengingat keterkaitan Jepang dengan ekonomi Asia jauh lebih besar, jika dibandingkan dengan AS dan Eropa. Pada waktu terjadinya krisis, pinjaman Jepang kepada negara-negara Asia berjumlah \$97 milyar (separuh di antaranya adalah pinjaman untuk proyek-proyek *real-estate*), sementara pinjaman AS dan Jerman ke kawasan ini secara berturut-turut hanya sejumlah \$24

milyar, dan \$32 milyar. Sedangkan investasi Jepang di kawasan ini mencapai \$100 milyar.<sup>18</sup> Secara demikian, jelas Jepang lebih rentan terhadap setiap perubahan yang terjadi di Asia, termasuk dengan terjadinya krisis ekonomi.

Sejak terjadinya krisis ekonomi Asia, Jepang telah menyalurkan dana sejumlah tidak kurang dari \$44 milyar, meskipun pada waktu itu belum ada mekanisme atau program tertentu yang didesain untuk itu. Dana tersebut disalurkan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut: (1) sebagai kontribusi untuk mendukung paket kebijakan IMF (\$19 juta); (2) untuk membantu melancarkan aktivitas investasi swasta dan pembiayaan perdagangan (\$22,5 milyar); (3) untuk membantu mengatasi dampak sosial krisis ekonomi terhadap masyarakat (\$140 juta); (4) untuk membantu perbaikan struktur ekonomi (\$1,98 milyar); dan (5) untuk pengembangan sumber daya manusia (\$64 juta).<sup>19</sup>

Dari komposisi penggunaan bantuan tersebut, terlihat bahwa bantuan yang ditujukan untuk melancarkan aktivitas investasi dan perdagangan mendapatkan

porsi paling besar (\$22,5 milyar), lebih dari separo jumlah bantuan keseluruhan. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa Jepang menggunakan bantuan tersebut untuk mendukung perusahaan-perusahaan Jepang yang beroperasi di Asia, yang mengalami kesulitan karena merosotnya penjualan akibat krisis. Seperti misalnya perusahaan otomotif terbesar di Jepang Toyota Motor Corp., mengalami penurunan penjualan sebesar 30% dibandingkan setahun sebelum terjadinya krisis, dan terpaksa menghentikan produksi dari dua pabrik mereka di Thailand. Beberapa perusahaan besar lainnya seperti Isuzu Motor Ltd., Sony Corp., dan sebagainya, juga mengalami penurunan penjualan yang drastis di pasar-pasar mereka di Asia. Kesulitan yang dialami perusahaan-perusahaan ini telah memaksa mereka mengurangi produksi, bahkan sebagian perusahaan menghentikan produksi mereka untuk sementara waktu. Pemerintah Jepang memang tidak menyangkal kenyataan ini, seperti dikemukakan sekretaris Menteri Luar Negeri dalam suatu dengar pendapat dengan wartawan, bahwa dalam paket bantuan tersebut

memang terdapat sejumlah bantuan (kira-kira \$1 milyar) yang diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan Jepang yang beroperasi di Asia.<sup>20</sup>

Pada bulan Oktober 1998, Jepang mengumumkan untuk memberikan lagi suatu paket bantuan, melalui apa yang dinamakan *Miyazawa Initiative* atau *Miyazawa Plan* (Rencana Miyazawa). Melalui mekanisme ini, Jepang akan menyalurkan dana bantuan sejumlah \$30 milyar secara langsung ke negara-negara yang terlanda krisis, yang akan digunakan untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi (ke tingkat sebelum krisis) dan membangun suatu sistem finansial yang kuat. Negara-negara yang akan menggunakan bantuan ini harus mengajukan proposal mereka kepada pemerintah Jepang, dan untuk keperluan tersebut, pemerintah Jepang akan mengirimkan suatu misi untuk membantu merumuskan program-program yang akan dilaksanakan. Jadi, pada dasarnya mekanisme yang dipakai dalam penyaluran bantuan ini adalah hubungan bilateral langsung dengan masing-masing negara. Secara demikian, *Miyazawa Initiative* ini tidak akan jauh berbeda

dengan bantuan-bantuan ekonomi lain seperti ODA, Yen Loan, dan sebagainya, yang disalurkan melalui *OECD (Overseas Economic Cooperation Fund)*, lembaga pengelola bantuan Jepang di bawah Kementerian Luar Negeri.

Beberapa pengamat ekonomi Jepang menyatakan bahwa penerapan Rencana Miyazawa ini juga akan membawa keuntungan secara langsung bagi Jepang sendiri, di samping keuntungan jangka panjang bagi negara-negara Asia. Hal ini terutama berkaitan dengan sasaran kedua dalam bantuan Miyazawa Plan, yaitu perbaikan-perbaikan struktural ekonomi negara-negara yang terlanda krisis. Sedikitnya ada tiga bidang yang menjadi sasaran, yaitu pertama perbaikan di sektor ekspor yang selama ini menyebabkan defisit neraca perdagangan; kedua pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang penting artinya untuk mendukung ekonomi dimasa mendatang; dan ketiga, peningkatan efisiensi dibidang investasi, terutama yang menyangkut perbaikan infrastruktur.<sup>21</sup>

Jika perbaikan-perbaikan dalam ketiga sektor utama ini dapat dicapai, maka kepercayaan

investor asing akan pulih dan ekonomi negara-negara Asia akan kembali berjalan seperti sediakala (*back on track*). Menurut Takuma Hatano, direktur Bank Ekspor-Impor Jepang (Jexim) yang bertanggung jawab menyalurkan dana, tentang tujuan *Miyazawa Initiative*:

*"The aim is to rebuild private investor confidence, so the money must be directed at developing better corporate governance, more transparency in accounting and more effective bankruptcy laws. 'This is bail-in, not bailout.'"*<sup>22</sup>

Secara demikian, bantuan keuangan Jepang baik yang diberikan tanpa melalui suatu program tertentu, maupun yang dikemas dalam *Miyazawa Initiative*, sebenarnya merupakan sarana untuk mendukung kepentingan ekonomi Jepang di Asia. Meskipun Jepang gagal dalam upayanya mendapatkan pengakuan internasional terhadap perannya sebagai *leader* dalam mengatasi krisis ekonomi Asia, namun masyarakat Jepang pada umumnya merasa bangga bahwa negara mereka telah menyalurkan bantuan keuangan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bantuan yang diberikan oleh negara-negara maju lainnya. Walaupun melalui ban-

tujuan tersebut Jepang juga memperoleh keuntungan-keuntungan yang sangat berarti untuk mendukung perbaikan ekonomi dalam negerinya, para pemimpin Jepang percaya bahwa pada akhirnya masyarakat Asia akan melihat bahwa Jepang telah menunjukkan kesungguhannya untuk tetap berada di pihak mereka, pada masa-masa krisis. Seperti dikemukakan Eisuke Sakakibara: *"We have been getting a lot of gratitude—on public occasions too, (and) our relationship (with Asia) has become a lot closer."*<sup>23</sup> Pandangan ini didukung pula oleh Ishihara, yang secara optimistis menyatakan bahwa bantuan Jepang:

*"Ought to bring a new sense of solidarity to Asian countries. And if Japan moved forward in a big way, providing among other things, more sophisticated technology than it ever has, there would no doubt be an economic revival and expansion in East Asia."*<sup>24</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun bantuan keuangan merupakan hal penting dalam mengatasi krisis ekonomi Asia, namun yang lebih penting lagi bagi Jepang adalah, kesempatan untuk menyumbangkan kemampuannya melalui transfer teknologi guna membangun ketahanan ekonomi Asia dalam jang-

ka panjang.

### Upaya Pembentukan "Yen Block"

Motivasi lain yang melandasi bantuan Jepang kepada negara-negara Asia yang mengalami krisis ekonomi adalah untuk menciptakan suatu sistem moneter yang stabil di kawasan ini (sasaran keempat dari *Miyazawa Initiative*). Hal ini, secara tidak langsung berkaitan pula dengan upaya jangka panjang Jepang untuk merealisasikan pembentukan "Yen block."<sup>25</sup> Selama ini, negara-negara Asia Timur mempunyai keterkaitan ekonomi yang erat dengan Jepang dalam situasi saling ketergantungan, baik dalam bidang perdagangan maupun investasi. Akan tetapi, sistem moneter yang dianut negara-negara Asia Timur ini didasarkan pada denominasi dollar, sehingga perekonomian mereka seringkali menjadi rentan akibat fluktuasi dan ketidakstabilan sistem moneter internasional (yang selama ini berpusat pada dollar).

Oleh karena itu, usulan tentang pembentukan suatu sistem moneter yang didasarkan pada Yen (internasionalisasi Yen) su-

dah sejak lama menjadi pemikiran dikalangan akademisi, sebagai alternatif sistim moneter bagi kawasan Asia. Dengan sistem ini, nilai tukar Yen akan digunakan sebagai "monetary unit" dikalangan negara-negara Asia, sehingga akan mendorong terciptanya suatu koordinasi kebijakan ekonomi yang lebih baik diantara negara-negara tersebut. Memang usulan ini masih terus dipertimbangkan keuntungan dan kerugiannya jika nanti benar-benar dapat direalisasikan. Namun demikian, Jepang sangat antusias terhadap konsep ini, dan berharap ada kesempatan untuk bisa menerapkan konsep ini.

Berdasarkan penelitian Kwan,<sup>26</sup> pembentukan "Yen block" memerlukan prasyarat-prasyarat cukup kompleks yang harus dipenuhi baik oleh Jepang maupun negara-negara Asia Timur lainnya. Diantara prasyarat-prasyarat tersebut antara lain adalah: (1) untuk mendorong transformasi Asia Timur dari *dollar block* ke *yen block*, Jepang perlu membuka pasarnya secara luas guna menampung ekspor negara-negara Asia Timur; (2) sejalan dengan semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi, struktur

perdagangan negara-negara Asia Timur dimasa mendatang harus sejalan dengan Jepang (yang berarti perdagangan intra-regional harus lebih besar daripada ekstra-regional); (3) harus ada persamaan tingkat inflasi diantara negara-negara Asia Timur dengan Jepang, yang akan menjamin stabilnya nilai tukar dalam yen.

Dari hasil penelitian empirisnya, Kwan menemukan bahwa prasyarat-prasyarat tersebut belum bisa dipenuhi secara serempak baik oleh negara-negara Asia maupaun Jepang. Oleh karena itu, pembentukan suatu *Yen block* yang menggabungkan negara-negara NIEs, ASEAN dan Cina, tidaklah memungkinkan mengingat begitu besarnya perbedaan diantara kelompok-kelompok negara tersebut. Sebagai alternatif, Kwan mengusulkan penggabungan secara bertahap "monetary unit" negara-negara tersebut melalui strategi yang disebutnya "multi-track", yaitu: " (an) approach in which countries should only join when they have come to satisfy the above conditions."<sup>27</sup>

Ippei Yamazawa, sebaliknya merasa optimis bahwa kerjasama finansial yang lebih erat<sup>28</sup> di Asia dapat direalisasikan (terutama

setelah pengalamannya terjadinya krisis ekonomi Asia), dengan mengusulkan lima komponen utama untuk membentuk kerjasama finansial ini, yaitu<sup>29</sup>: (1) tindakan "realignment" nilai tukar negara-negara Asia Timur secara bersama-sama, ala Kesepakatan Plaza (1985) atau *Smithsonian agreement* (1971); (2) memperkenalkan suatu prosedur rutin untuk menghindari pergerakan kapital yang menyebabkan krisis likuiditas di negara-negara Asia; (3) menerapkan suatu koordinasi kebijakan makro ekonomi yang paling minimum diantara negara-negara Asia; (4) tiap-tiap anggota harus didorong untuk secara efektif melakukan koreksi terhadap setiap kekurangan dalam fundamental ekonomi mereka, khususnya sistem finansial yang lemah, agar dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi; dan (5) perluasan perdagangan dan investasi harus dilakukan secara terus-menerus, baik di dalam maupun diluar kawasan, untuk mengembalikan momentum pertumbuhan ekonomi yang pesat di kawasan Asia.

Kelima komponen ini, menurut Yamazawa, bukanlah suatu ide yang abstrak untuk diterapkan dalam rangka mengatasi kri-

sis ekonomi Asia, dan bahkan sebagian diantaranya sudah dilaksanakan. Seperti misalnya, koordinasi kebijakan makro ekonomi, sudah sejalan dengan *Manila Framework* yang disetujui oleh para wakil menteri keuangan Asia-Pasifik pada bulan November 1997. Oleh karena itu, langkah ini harus dilanjutkan dengan sungguh-sungguh dengan dukungan Jepang, seperti dinyatakan Yamazawa:

*"Japan is expected to take an initiative in making this proposal and to coordinate between the East Asian economies and the United States so that an East Asian Stable Currency Group can be formed in a timely manner. If the yen is increasingly held by East Asian economies both for trade and investment transactions and foreign exchange reserves, it will help to create a more stable currency regime in East Asia than the current one which relies heavily on the US dollar."*<sup>30</sup>

Secara demikian, bantuan ekonomi yang diberikan Jepang kepada negara-negara Asia untuk mengatasi krisis diharapkan akan mempunyai implikasi jangka panjang, yaitu terbentuknya ketahanan ekonomi kawasan, yang didukung oleh kesatuan sistem moneter. Namun demikian, sejauh mana hal ini akan terwujud belum dapat dipastikan, mengingat masih adanya hambatan-hambatan seperti fluktuasi

nilai tukar yen terhadap dollar, dan bervariasi tingkat pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia. Disamping itu, penciptaan suatu "*currency block*" perlu didukung oleh unsur-unsur lain (selain ekonomi), seperti sistim politik dan keamanan yang kuat, dimana dalam hal ini Jepang masih belum memadai. Hal inilah yang menjadikan "*dollar block*" di bawah dukungan AS masih akan berpeluang untuk tetap dominan, vis-à-vis "*yen block*" dalam beberapa dekade mendatang.

## Penutup

Keterkaitan ekonomi yang erat antara Jepang dan negara-negara Asia, telah menciptakan suatu mata rantai interdependensi ekonomi yang menjadikan mereka rentan terhadap krisis yang terjadi di salah satu bagian dari mata rantai tersebut. Sehingga, meskipun tidak secara langsung disebabkan oleh Jepang (terutama kondisi stagnasi ekonomi yang dialami Jepang), krisis ekonomi yang menimpa negara-negara Asia sejak Juli 1997, tidak bisa dipisahkan dari situasi dan kondisi ekonomi yang terjadi di Jepang. Pertumbuhan eko-

nomi pesat yang dinikmati negara-negara dikawasan ini selama beberapa dasawarsa terakhir, adalah berkat dukungan Jepang melalui investasi dan perdagangan, maupun pinjaman (*loan*) dan bantuan ekonomi (*aid*). Karena itulah, ketika negara-negara di kawasan ini mengalami krisis ekonomi, Jepang juga dituntut untuk berperan secara aktif dalam penyelesaian krisis tersebut.

Terjadinya krisis ekonomi Asia dalam suatu "*contagion effect*" merupakan suatu peringatan bagi negara-negara Asia akan kerentanan ekonomi mereka terhadap gangguan dari luar. Prestasi pembangunan ekonomi yang mengagumkan yang mereka capai selama dasawarsa terakhir ini, ternyata tidak didukung oleh suatu ketahanan ekonomi dalam negeri yang cukup kuat. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya krisis dimasa datang, perlu diciptakan suatu mekanisme kerjasama untuk memperkuat ketahanan ekonomi kawasan, yang harus dibangun tidak saja oleh negara-negara dikawasan, tapi juga harus melibatkan Jepang sebagai negara ekonomi kuat.

Dalam kerangka inilah maka bantuan keuangan Jepang yang disalurkan melalui *Miyazawa Ini-*



*tiative*, selain untuk membantu negara-negara Asia mengatasi krisis ekonomi secara langsung, sebenarnya juga didesain untuk membangun suatu sistem ekonomi dan keuangan yang lebih kuat di kawasan Asia. Namun demikian, sejauh mana tujuan ini akan tercapai masih harus dibuktikan melalui upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah negara-negara Asia dan Jepang. Secara demikian, diharapkan bantuan tersebut akan memberikan manfaat jangka panjang, yaitu terbentuknya ketahanan ekonomi Asia agar mampu terhindar dari krisis dimasa yang akan datang.

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri juga bahwa bantuan *Miyazawa Initiative* tersebut telah pula memberikan keuntungan bagi perbaikan ekonomi Jepang sendiri. Pulihnya perekonomian negara-negara Asia, diharapkan akan memacu mengalirnya kembali investasi Jepang ke kawasan ini, yang pada gilirannya akan menggairahkan kembali ekonomi Jepang. Secara demikian, akan terjadi efek timbal balik dalam mata rantai ekonomi Asia, di mana pada gilirannya nanti negara-negara Asia yang telah pulih dari krisis akan menjadi lokomotif yang menarik Jepang dari kesulitan ekonomi.

## Catatan Akhir

- 1 Inoue Reiko, "Searching for a Third Path," *AMPO: Japan Asia Quarterly Review*, Vol.28, No.3, 1998, hal39-44.
- 2 Kinoshita Toshihiko, "Crisis in Asia: Who's to Blame?" *Look Japan*, November 1998, pp24-25.
- 3 *Chaebol* adalah konglomerat industri yang dimiliki oleh keluarga-keluarga, dan didukung oleh pemerintah, karena merupakan salah satu motor penggerak industrialisasi di Korea Selatan.
- 4 Ishihara Shintaro terkenal sebagai penentang yang gigih terhadap kebijakan AS di Jepang dan Asia Timur, seperti tercermin dalam bukunya *A Japan That Can Say No*. Pendapatnya berikut ini adalah bagian dari kritiknya yang terbaru terhadap kondisi ekonomi global saat ini, yang dimuat *Asiaweek* edisi 16 Oktober 1998, dengan judul "Behind the Asian Crisis: Japan must help the region resist American control."
- 5 Ippei Yamazawa, "The Asian Economic Crisis and Japan," *The Developing Economies*, XXXVI-3 (September 1998): 332-51.
- 6 Peter Landers, "No Help Here," in *Far Eastern Economic Review* edisi *Crash of '97: How the Financial Crisis Is Reshaping Asia*, edited by Dan Bier, Review Publishing Company Limited, Hong Kong, 1998, hal.94.
- 7 Hiroshi Kuniyoshi, "Is Economic Package enough? Recovery is crucial for Japan, Asia and the rest of the world," *Japan Times*, May 18, 1998.
- 8 News Analysis dari *The Straits Times*, February 7, 1998, "Asean will urge Japan to do more for region."
- 9 Lihat, "Asean will urge Japan to do more for the region," News Analysis in *The Straits Times*, Februari 7, 1998, hal.46.
- 10 *Ibid*.
- 11 Koichi Hamada, "From the AMF to the Miyazawa Initiative: Observations

- on Japan's Currency Diplomacy," *The Journal of East Asian Affairs, Spring/Summer 1999, Vol. III, No. 1, hal. 36*
- 12 Eric Altbach, "The Asian Monetary Fund Proposal: A Case Study of Japanese Regional Leadership," *Japan Economic Institute Report, No. 47A* (December 19, 1997), hal. 8-9.
  - 13 Koichi Hamada, *op. cit.*
  - 14 Lihat misalnya editorial *Asiaweek* 15 Mei 1998, "Lend Me Your Ears: At last, the Asian Development Bank is speaking up."
  - 15 Kinoshita Toshihiko, "Crisis in Asia: Who's to Blame?", 1998, hal. 24. Garis bawah oleh penulis.
  - 16 Dalam proposal tersebut tidak dirinci secara jelas bagaimana rencana tersebut akan dilaksanakan, tidak dimuat pula analisa fungsi-fungsi ekonomi, tidak pula dijelaskan filosofi yang mendasari diusulkannya proposal tersebut, dan sebagainya. Lihat Koichi Hamada, hal. 45.
  - 17 Pada dasarnya, hampir semua kebijakan ekonomi luar negeri Jepang yang berkaitan dengan ODA meupun official loans, memang lemah dalam segi falsafah yang mendasari tujuan kebijakan tersebut.
  - 18 Kent E. Calder, "Japan's Crucial Role in Asia's Financial Crisis," *Japan Quarterly*, April-June 1998, hal. 6
  - 19 Data dari Ministry of Foreign Affairs of Japan, "Asian Economic Crisis and Japan's Contribution," Desember 1998.
  - 20 Press Release Kementerian Luar Negeri Jepang, November 1998.
  - 21 "Beyond the Asian Currency Crisis," *Look Japan*, February 1999, hal. 18.
  - 22 Peter Montagnon, "Japan takes pride in the help it gives to South-East Asia, and hopes to profits," *Financial Times*, July 1, 1999.
  - 23 Peter Montagnon, "Japan takes pride in the help it gives to Southeast Asia," *Ibid.*
  - 23 Ishihara Shintaro, *Asiaweek*, 16 Oktober 1998, hal. 103.
  - 25 Yang dimaksud "Yen block" adalah, suatu kelompok negara yang menggunakan mata uang Yen sebagai nilai tukar internasional, dan mengusahakan terpeliharanya nilai tukar yang stabil terhadap Yen.
  - 26 C.H. Kwan, "The Theory of Optimum Currency Areas and the Possibility of Forming a Yen Block in Asia," *Journal of Asian Economics* 9 (4), 1998, hal. 555-580.
  - 27 Kwan, *Journal of Asian Economics*, hal. 573
  - 28 Dalam hal ini, Yamazawa tidak menyebut *Yen block* secara lebih spesifik, tetapi menunjuk pada suatu kerangka yang lebih luas, yaitu *financial cooperation*. Lihat Ippei Yamazawa, "The Asian Economic Crisis and Japan," *The Developing Economies*, XXXVI-3 (September 1998).
  - 29 Ippei Yamazawa, hal. 348-9.
  - 30 Ippei Yamazawa, hal. 350.

## PETUNJUK SINGKAT BAGI PENULIS

01. Naskah harus sesuai dengan pandangan dan misi jurnal ini.
02. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan Ejaan Yang Disempurnakan.
03. Panjang naskah antara 25 sampai 40 halaman kuarto spasi ganda yang dikirimkan dalam bentuk cetakan dan atau disket disertai biografi penulis.
04. Judul diusahakan cukup informatif dan tidak terlalu panjang. Judul yang terlalu panjang harus dipecah menjadi judul dan anak judul.
05. Nama (nama-nama) penulis (tanpa gelar) diberi garis bawah untuk penulisan kepala halaman.
06. Sitasi keputustakaan (kalau ada) dilakukan dengan sistem nama-tahun, contoh:  
Menurut Warsito (1965) ....  
Seperti dikemukakan Sudigdo (1972; Putranto, 1974 cit. Sudirman, 1983), bahwa Lembaga Pemilihan Umum ....  
Dimungkinkan juga digunakan sistem catatan kaki dengan diberi angka urut.
07. Daftar pustaka ditulis dalam urutan abjad secara kronologis:
  - (a) Untuk buku: nama pokok dan inisial pengarang, tahun terbit, judul, jilid, edisi, nama penerbit, tempat terbit.
  - (b) Untuk karangan dalam buku: nama pokok dan inisial pengarang, tahun, judul karangan, inisial dan nama editor: judul buku, halaman permulaan dan akhir (karangan), nama penerbit, tempat terbit.
  - (c) Untuk karangan dalam majalah atau jurnal: nama pokok dan inisial pengarang, tahun, judul karangan, singkatan nama majalah, jilid, (nomor), halaman permulaan dan akhir.
  - (d) Untuk karangan dalam pertemuan: nama pokok dan inisial pengarang, tahun, judul karangan, singkatan nama pertemuan (penyelenggara), waktu, tempat pertemuan.

Contoh:

Thomas J. McCormick, 1989, *America's Half-Century: United States Foreign Policy in the Cold War*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 273 hal.